



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES
KOMISI X DPR RI
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021
TANGGAL 10 – 14 APRIL 2021**

I. PENDAHULUAN

Komisi X DPR RI membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan. Pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2020-2021, sesuai dengan hasil keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 8 Maret 2021 bahwa Komisi X DPR RI akan melakukan Kunjungan Kerja Masa Reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke 3 (tiga) daerah yaitu ke Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kota Malang Provinsi Jawa Timur.

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

1. Pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945;
2. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
3. Pasal 59 ayat (3) huruf f Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
4. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Masa Reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021;
5. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 8 Maret 2021 tentang Rencana Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Masa Reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Jawa Timur.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari Pejabat Daerah mengenai implementasi UU dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah, menggali dan menyerap aspirasi dari daerah, dan mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan berbagai persoalan tentang pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan di provinsi yang dikunjungi. Sedangkan tujuan kunjungan kerja ini adalah:

1. Untuk mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan berbagai persoalan tentang pelaksanaan kebijakan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan, khususnya dalam masa pandemi Covid 19 di Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Untuk mendapatkan masukan terkait pokok-pokok substansi pembangunan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam masa pandemi Covid-19, sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi X DPR RI;
3. Memantau secara langsung implementasi rekomendasi beberapa Panja Non RUU Komisi X DPR RI, kendala dan permasalahan, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk pengambilan kebijakan, khususnya dalam masa pandemi Covid -19.

C. AGENDA KUNJUNGAN KERJA

Metode yang digunakan dalam melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

1. Melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan yang dihadiri:
 - a. Muspida Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua LPMP, Dewan Pendidikan, PGRI, Tokoh-tokoh Pendidikan, dan para Pakar Pendidikan dan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - d. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, PHRI, ASITA, PUTERI, instansi terkait yang menangani kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, lembaga seni dan tokoh budayawan di Sulawesi Selatan;
 - e. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, KONIDA, KNPI, perwakilan organisasi Cabang Olahraga (Cabor) dan organisasi kepemudaan serta Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Sulawesi Selatan.
 - f. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - g. Pimpinan PTN, PTS, dan LLDIKTI Wilayah IX Wilayah Sulawesi dan Gorontalo, yaitu:
 - 1) Universitas Hasanuddin
 - 2) Universitas Negeri Makassar
 - 3) Universitas Islam Makassar
 - 4) Universitas Muhammadiyah Makassar
 - 5) Politeknik Pariwisata Makassar
 - 6) Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus
2. Peninjauan lapangan ke SMUN 21 Makassar;
3. Peninjauan lapangan ke Benteng Rotterdam Ujung Pandang.

D. TIM KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan pada Masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 terdiri dari Anggota Komisi X DPR RI, Sekretariat Komisi X DPR RI, Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, dan Wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI. Tim diketuai oleh My Esti Wijayati, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

Tim kunjungan ini didampingi oleh mitra kerja Komisi X DPR RI, yaitu Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kememparekraf RI, Dr. Wisnu Bawa Tarunajaya, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemempora RI, Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Si., DFM, dan Direktur PAUD Kemendikbud RI, Dr. Muhammad Hasbi.

II. ISI LAPORAN

A. IDENTIFIKASI DATA DAN INFORMASI

1. Bidang Pendidikan

Bantuan Operasional Sekolah

- a. Sejak tahun 2019 sampai 2021, bantuan operasional sekolah diberikan kepada SMA, SMK melalui transfer dana langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KKPN) langsung ke rekening sekolah;
- b. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Bantuan Operasional Sekolah Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler kepada seluruh kepala UPT SMA, UPT SMK dan UPT SLB. Sosialisasi dimaksudkan untuk menyamakan persepsi sehingga tidak ada pelanggaran dan penyalahgunaan anggaran BOS.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

- a. Tahun 2021, sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) DAK, pelaksanaan penggunaan DAK untuk pembangunan fisik sudah tidak dilakukan lagi melalui swakelola tetapi sudah menggunakan mekanisme kontraktual yang dilakukan oleh pihak ke 3. Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada SMA, SMK dan SLB dilakukan dengan pengawasan yang ketat;
- b. Proses pelaksanaan DAK diawali dengan sosialisasi dan bimbingan teknis pelaporan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA, SMK dan SLB. Hal tersebut ditujukan untuk menyatukan persepsi tentang pelaksanaan DAK yang sesuai Juknis yang dikeluarkan oleh Kemendikbud RI. Dalam pelaksanaan pengawasan pelaksanaan DAK, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan Kejaksaan, Kepolisian dan Dinas Perpajakan.

Kurikulum

- a. Secara umum seluruh Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan Kurikulum 2013. Selain itu ada model pembelajaran tuntas berbasis kurikulum muatan lokal namun tetap sejalan dengan Kurikulum 2013, seperti yang dikembangkan di Kabupaten Gowa;
- b. Terdapat beberapa SMK yang telah menjalin Kerjasama dengan industri di antaranya SMKN 10 Makassar kerjasama dengan SAMSUNG dan SMKN 1 Luwu Utara bekerjasama dengan PT Mars Indonesia.

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Sulawesi Selatan

- a. Pelaksanaan PPDB SMA, SMK dan SLB Tahun 2021 dilaksanakan secara daring dengan mengikuti Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dengan ketentuan jalur untuk pendaftaran SMA adalah Jalur Zonasi (80%), Jalur Afirmasi (15%), Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (5%) dan jika masih ada sisa kuota dari Jalur Zonasi, Jalur

- Afirmasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali maka akan dibuka Jalur Prestasi yang terdiri dari Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik;
- b. PPDB SMK dilaksanakan dengan terlebih dahulu melaksanakan tes bakat minat yang menjadi pertimbangan ditambah dengan nilai prestasi akademik dan non akademik, di samping memberlakukan ketentuan khusus seperti buta warna dan tinggi badan pada kompetensi keahlian tertentu;
 - c. Sementara PPDB SLB dilaksanakan secara *offline* di masing-masing sekolah, demikian halnya dengan SMA Keberbakatan Olahraga dilaksanakan secara *offline* dan prosesnya diserahkan ke sekolah;
 - d. Khusus SMA dan SMK yang berada di daerah 3T melaksanakan PPDB secara *offline* karena keterbatasan akses dan jaringan internet.

Kuota Belajar dan Pembelajaran Jarak Jauh

- a. Sampai saat ini, pembelajaran tingkat SMA dan SMK di 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan masih dilakukan secara daring dengan persentasi sekolah yang melakukan daring sebanyak 98%;
- b. Orang tua dan peserta didik mengeluhkan untuk memenuhi kebutuhan biaya data kuota belajar terutama dari kalangan ekonomi tidak mampu;
- c. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyalurkan bantuan kuota internet dari PT Telkomsel kepada 610.311 peserta didik di wilayah Sulawesi Selatan;
- d. Melalui Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 420/3450/Disdik Tentang Kebijakan Belajar dari Rumah (BDR) tanggal 5 April 2021, BDR diperpanjang dari tanggal 5 April 2021 sampai dengan 25 Juni 2021;
- e. Saat ini sedang dilakukan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada SMAN 21 Makassar, SMAN 2 Makassar, SMAN 4 Makassar.

Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi

Penyelenggaraan pendidikan vokasi dilaksanakan oleh Unit Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang mengelola SMK Negeri dan SMK Swasta. Upaya untuk pengembangan pembangunan bidang pendidikan vokasi dilaksanakan melalui program Revitalisasi SMK, Maksimalisasi Dana DAK Fisik, serta ada 19 SMK berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan SMK Pusat Keunggulan (PK).

Persiapan Pembukaan Sekolah Untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM)

- a. Persiapan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam mempersiapkan pelaksanaan PTM ialah, (1) sosialisasi, (2) melaksanakan vaksinasi guru, (3) pemenuhan daftar periksa berdasarkan Dapodik, (4) menyusun prosedur operasional standar pembelajaran tatap muka, (5) semua tahapan persiapan dan

pelaksanaan PTM mengacu pada SKB 4 Menteri tentang Pembelajaran Di Saat Pandemi COVID-19;

- b. Data perkembangan pelaksanaan vaksinasi guru dan tenaga kependidikan SMU dan SMK di Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan sebagai berikut:

DATA PELAKSANAAN VAKSIN COVID 19 TENDIK & KEPENDIDIKAN JENJANG SMA/SMK & SLB DI SULAWESI SELATAN											
No	Kabupaten/Kota	SMA			SMK			SLB			Keterangan
		Jml	Neg	Sws	Jml	Neg	Sws	Jml	Neg	Sws	
1	Kota Makassar	131	23	108	88	13	75	22	2	20	Vaksin Covid 19, Senin 12 April 2021
2	Kab. Bone	36	30	6	23	10	13	9	1	8	Vaksin Covid 19 Tahap I telah selesai
3	Kab. Gowa	48	22	26	21	5	16	6	1	5	Vaksin Covid 19, Senin 12 April 2021
4	Kab. Wajo	19	15	4	16	9	7	2	1	1	Vaksin Covid 19 sudah selesai
5	Kab. Bulukumba	21	19	2	18	11	7	2	1	1	Menunggu jadwal dari Dinkes Kab
6	Kab. Jeneponto	23	14	9	21	10	11	4	2	2	Menunggu jadwal dari Dinkes Kab
7	Kab. Pangkajene Kepulauan	32	24	8	14	9	5	2	1	1	Sementara berlangsung Vaksin tahap I
8	Kab. Luwu	25	19	6	25	13	12	3	0	3	Sementara berlangsung Vaksin tahap I
9	Kab. Pinrang	15	11	4	17	10	7	1	1	0	Vaksin Covid 19 Tahap I telah selesai
10	Kab. Sinjai	16	14	2	11	4	7	2	1	1	Menunggu jadwal dari Dinkes Kab
11	Kab. Maros	32	14	18	19	2	17	2	1	1	Vaksin Covid 19, Senin 12 April 2021
12	Kab. Sidenreng Rappang	16	11	5	12	8	4	1	1	0	Vaksin Covid 19 Tahap I telah selesai
13	Kab. Tana Toraja	18	13	5	30	4	26	3	1	2	Vaksin Covid 19 sudah selesai
14	Kab. Luwu Utara	19	19	0	14	8	6	3	0	3	Vaksin Covid 19 Tahap I telah selesai
15	Kab. Takalar	22	13	9	9	7	2	6	2	4	Menunggu jadwal dari Dinkes Kab
16	Kab. Enrekang	17	12	5	10	6	4	1	1	0	Menunggu jadwal dari Dinkes Kab
17	Kab. Toraja Utara	15	9	6	23	5	18	1	0	1	Sementara berlangsung Vaksin tahap I
18	Kab. Barru	9	6	3	6	5	1	1	1	0	Menunggu jadwal dari Dinkes Kab
19	Kab. Soppeng	12	8	4	11	5	6	5	1	4	Vaksin Covid 19 sudah selesai
20	Kab. Luwu Timur	19	13	6	4	2	2	3	0	3	Sementara berlangsung Vaksin tahap I
21	Kab. Kepulauan Selayar	11	9	2	8	8	0	1	1	0	Menunggu jadwal dari Dinkes Kab
22	Kab. Bantaeng	8	6	2	12	5	7	2	1	1	Menunggu jadwal dari Dinkes Kab
23	Kota Palopo	12	6	6	18	7	11	2	1	1	Sementara berlangsung Vaksin tahap I
24	Kota Parepare	10	5	5	13	3	10	2	1	1	Vaksin Covid 19 Tahap I telah selesai
	Total	586	335	251	443	169	274	86	23	63	

Masukan Untuk Penyusunan Peta Jalan Pendidikan

- Pemprov Sulawesi Selatan mengusulkan dalam penyusunan Peta Jalan Pendidikan memberikan perhatian lebih atas beberapa persoalan berikut, (1) Perhatian terhadap pendidikan di daerah 3T, (2) Distribusi Guru yang merata, (3) Kompetensi Guru (4) Peningkatan kesejahteraan guru, (5) Perlindungan hukum kepada guru dan (6) tingginya angka anak putus sekolah;
- Perlunya perbaikan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Lainnya, yang meliputi kegiatan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- Program pengembangan pendidikan vokasi disesuaikan dengan kebutuhan zaman (Revolusi Industri 4.0).

2. Bidang Kebudayaan

- Berikut beberapa kebijakan dan regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemprov Provinsi Sulawesi Selatan untuk upaya pembinaan dan pelestarian tradisi dan budaya di Provinsi Sulawesi Selatan:
 - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Tak Benda;

- 3) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - 4) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1022/V/2019 Tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 5) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 173/I/Tahun 2020 Tentang Penunjukan dan Penetapan Tenaga Ahli Bidang Kebudayaan Dan Bidang Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 6) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020; Pembentukan Dewan Kebudayaan Tahun 2020.
- b. Kebijakan Pemprov Sulawesi Selatan selama tiga tahun terakhir dalam pemajuan kebudayaan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut, (1) mendorong percepatan penetapan pemukiman tradisional Tana Toraja sebagai warisan dunia, (2) mendorong beberapa tradisi di Sulawesi Selatan menjadi warisan budaya tak benda, (3) mendorong revitalisasi Benteng Somba Opu, (4) melakukan penetapan cagar budaya peringkat provinsi, (5) melakukan pemeliharaan cagar budaya di Sulawesi Selatan, (6) melakukan pelestarian permainan tradisional, (7) mendorong pembentukan dan pengembangan lembaga adat di Sulawesi Selatan, (8) pengusulan Geopark Maros – Pangkep menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark (UGGP), dan pembentukan Geopark Matao dan Toraja.
- c. Dinas Kebudayaan Pemprov Sulawesi Selatan dalam upaya pelaksanaan pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Sulawesi Selatan sesuai dengan arahan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah melaksanakan program pengelolaan kekayaan budaya dan program pengelolaan keragaman budaya dalam bentuk kegiatan pemeliharaan, pelestarian, pembinaan dan publikasi kebudayaan, penguatan ketahanan budaya, penguatan lembaga adat, pelestarian warisan budaya benda dan tak benda, pemberdayaan sumber daya manusia seni budaya baik secara kelompok maupun perorangan dengan melibatkan tim ahli (akademisi, budayawan dan praktisi).
- d. Berikut penetapan Cagar Budaya Peringkat di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dikeluarkan dalam tiga tahun terakhir:
- 1) Penetapan Bangkai Pesawat Tempur Amerika P-38 Lightning di Perairan Lae-Lae sebagai Benda Cagar Budaya Tahun 2018;
 - 2) Penetapan bangunan kantor otoritas pelabuhan utama makassar tahun 2019;
 - 3) Penetapan dan Pemeringkatan Gedung Mulo Tahun 2019;
 - 4) Penetapan dan Pemeringkatan Gereja Katedral Tahun 2019;
 - 5) Penetapan dan Pemeringkatan Rumah Jabatan Gubernur Tahun 2019;

- 6) Penetapan dan Pemingkatan Kawasan Benteng Somba Opu Tahun 2019;
 - 7) Penetapan Situs Cagar Budaya Kete' Kesu' sebagai Cagar Budaya peringkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
 - 8) Penetapan Situs Cagar Budaya Londa sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
 - 9) Penetapan Situs Cagar Budaya Kalimbuang Bori sebagai Cagar Budaya peringkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
 - 10) Penetapan Situs Cagar Budaya Buntu Pune sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
 - 11) Penetapan Situs Cagar Budaya Rante Karassik sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
 - 12) Penetapan Situs Cagar Budaya Pala'tokke sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.
- e. Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki dua Warisan Dunia Tak Benda yang ditetapkan oleh UNISCO, yaitu:
- 1) Naskah La Galigo sebagai Memory of the World (MOW) Tahun 2011;
 - 2) Pinisi sebagai *The Art of Boatbuilding in South Sulawesi : Refresmentatif List Of The Intangible Cultural Heritage Of Humanity* Tahun 2017.
- f. Provinsi Sulawesi Selatan telah mendapatkan penghargaan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia untuk beberapa hasil budaya tak benda sebagai berikut:
- 1) Tahun 2013 : Pinisi, Pagellu, Sinrilli, dan Pakkarena (4 karya Budaya);
 - 2) Tahun 2014 : Pappeka RiMakka, Badik, dan Tongkonan (3 karya Budaya);
 - 3) Tahun 2015 : Ganrang Makassar, Ma'badong dan Coto Makassar (3 karya Budaya);
 - 4) Tahun 2016 : A'Raga/Ma'Raga, Tudang Sipulung, Maudu Lompoa, Mappadendang, Mappalili Sigeri dan Lipa Sabbe (6 karya Budaya);
 - 5) Tahun 2017 : Barongko, Kelong Pakkiyo, Bunting, Tari Salonreng, Passura', Upacara Maccera Manurung di Kaluppini, dan Balla To Kajang (6 karya Budaya);
 - 6) Tahun 2018 : Upacara Songkabala Accera, Kalompoang, Parade A'jaga Tubarani, Sirawu Sulo (Sirampe' api), Mattompang Arajang, Songkok To Bone (SongkokRecca), Rumah Adat Karampuang, Mappogau Sihanua, Marimpasalo, Passureq, Pa'gambusu (Gambus Ogi), Kelong Batti-batti, Rambu Solo', Anynyorong Lopi, Tari Kajangki, Mangngaru, Kapurung, Pajjaga Bone Balla, Mallangi Arajang ri GoariE, Mappacci, Mangrara Banua, Maccera Arajang (21 karya Budaya);
 - 7) Tahun 2019 : Kondobuleng, Massulo Beppa, Maccera Tasi, Didek, Salokoa (5 karya Budaya);
 - 8) Tahun 2020 : Kawali Gecong, Tari Se're Maggiri, Tari Moringgo (3 Karya Budaya).

3. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong investasi sektor pariwisata dan memperkuat promosi pariwisata dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal diupayakan dengan menerapkan tiga strategi, yaitu, *Pertama*, strategi inovasi dengan menggunakan teknologi seperti *big data* dan pendekatan kekinian untuk memetakan, baik dari segi potensi maupun penguatan, serta memastikan para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa bertahan. *Kedua*, strategi adaptasi, termasuk di saat pandemi sekarang ini, dengan menerapkan protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment) di setiap destinasi pariwisata dan lini ekonomi kreatif demi mempercepat pulihnya kepercayaan wisatawan terhadap pariwisata pada masa pandemi saat ini. *Ketiga*, berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, universitas, serta masyarakat dan dunia usaha dalam memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif di Tanah Air. Target pemerintah tuntaskan pembangunan jalan di kawasan Destinasi Wisata Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata di Sulawesi Selatan, telah melakukan *direct promotion* dalam dan luar negeri, *Familiarization Trip (Fam Trip)*, menyediakan data/ informasi pariwisata Sulsel. Selain itu, melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas tata kelola destinasi serta mengembangkan kemitraan sumber daya pariwisata dengan melaksanakan kegiatan aksi gerakan sadar wisata dan aksi sapa pesona;
- c. Menurut data BPS Provinsi Sulawesi Selatan terkait perkembangan pariwisata dan transportasi sampai bulan November 2020:
 - 1) Kunjungan wisatawan mancanegara tercatat hanya 1 kunjungan;
 - 2) Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Selatan hanya dapat dicapai sebesar 12% dari tahun sebelumnya atau 822.969 kunjungan;
 - 3) TPK hotel klasifikasi bintang hanya terisi 42,56%
 - 4) Rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik masing-masing sebesar 3,08 dan 1,54 hari;
 - 5) Bandara Hasanuddin tidak ada penumpang dari penerbangan internasional.
- d. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memulihkan sektor ekonomi melalui pariwisata yaitu mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kearifan lokal di daerah masing-masing sebagai upaya membangun pariwisata berkelanjutan di era adaptasi kebiasaan baru. Tujuannya untuk membangun pariwisata berkelanjutan di tengah pandemi COVID-19, selain itu, penerapan CHSE (*Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability*) penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) Pelaksanaan Kegiatan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di masa Pandemi COVID-19 menjadi tahapan wajib guna mendorong Kembali Pariwisata di Sulawesi Selatan;

- e. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan Peraturan Gubernur tentang Pramuwisata guna menyiapkan Sumber Daya Manusia dalam menyambut pembukaan aktifitas pariwisata, selain itu telah melakukan kegiatan seperti Workshop Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Destinasi serta gerakan Sadar wisata dan Aksi Sapta Pesona;
- f. Dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada sektor ekonomi kreatif pada tahun 2021 terealisasi dalam bentuk kegiatan Workshop Fotografi dan Workshop Desain Produk yang ditujukan kepada para pelaku industri ekonomi kreatif. Upaya dukungan lain untuk mengenalkan produk-produk dari pelaku usaha ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan di antaranya, fashion show sutera, pekan produk kreatif, lomba cipta lagu anak daerah, pendataan pelaku ekonomi kreatif, lomba nyanyi dan cipta lagu daerah;
- g. Saat ini industri kreatif di Sulawesi Selatan yang sangat berkembang pesat yaitu kuliner, tetapi pelaku usaha kuliner masih membutuhkan dukungan modal dan kebijakan dari pemerintah daerah.

Saran atau masukan terkait dengan revisi UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan dalam upaya revisi UU No. 10 Tahun 2021 tentang Kepariwisata, perlunya penguatan peran serta masyarakat dalam merencanakan dan mengembangkan pariwisata di daerah. Selain itu tata kelola destinasi pariwisata perlu diselenggarakan secara sistematis, terpadu dan berorientasi pada masyarakat lokal. Pengelolaan yang tepat menjadi sangat penting dalam mengembangkan destinasi pariwisata dengan karakter yang berbeda.

4. Bidang Olahraga

- a. Penyelenggaraan pertandingan tingkat nasional masih minim dilaksanakan di Kota Makassar. Penyelenggaraan pertandingan tingkat nasional diperlukan untuk menggairahkan kembali pembinaan olahraga prestasi di daerah Sulawesi Selatan;
- b. Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola keolahragaan untuk menunjang prestasi diarahkan dalam bentuk dana dekonsentrasi dan telah dilaksanakan oleh Dispora Sulsel dengan hasil yang cukup baik;
- c. Saat ini pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih tetap mempersiapkan diri untuk mengikuti beberapa even olahraga dengan menerapkan protokol kesehatan dengan gambaran kondisi sebagai berikut:

1) PON

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memprogramkan dan mempersiapkan keikutsertaan tim pada PON XX di Papua mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pasca kegiatan. Provinsi Sulawesi Selatan pada PON XX akan mengikutkan 34 cabang olahraga dengan jumlah atlet sebanyak 235 orang. Namun demikian masih perlu mendapatkan perhatian khusus terkait

ketersediaan anggaran untuk memenuhi semua kebutuhan keikutsertaan Tim Sulawesi Selatan.

2) **PEPARNAS**

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pembinaan dengan mempersiapkan atlet dan pelatih sejak tahun 2019 dengan mengikuti even olahraga nasional yang diselenggarakan di Kota Solo Provinsi Jawa Tengah dan berkelanjutan untuk berpartisipasi dalam PEPARNAS 2021. Namun saat ini kemampuan finansial daerah belum dapat memenuhi kebutuhan tim untuk ikut pada even tersebut dan masih dalam proses pengajuan agar Provinsi Sulsel dapat ikut serta.

3) **SEA GAMES**

Terdapat beberapa atlet asal Provinsi Sulawesi Selatan tengah menjalankan pelatihan nasional untuk mempersiapkan diri membela Indonesia mengikuti event Sea Games yang akan diselenggarakan di negara Vietnam. Dalam tahun yang sama di masa pandemi Covid-19 beberapa event olahraga besar juga tetap akan diselenggarakan sehingga membutuhkan alokasi anggaran yang cukup banyak, sehingga membutuhkan dukungan dan perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Usulan dan masukan atas Revisi UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta Pemangku Olahraga di Sulawesi Selatan

a. Olahraga Prestasi (pasal 20 dan 27)

Kondisi saat ini penanganan olahraga prestasi diarahkan terpusat semata-mata hanya pada pengurus cabang olahraga di bawah koordinasi KONI (pusat dan daerah), padahal olah raga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan berbasis IPTEK. (Penerapan UU 23 tahun 2014 khusus kewenangan di Bidang Keolahragaan, Perpres 95 tahun 2017). Maka dalam hal ini mengusulkan sebagai berikut:

- 1) Perlu ada pengaturan yang jelas antara tugas KONI Pusat dan Pemerintah (Kemenpora) begitu juga pada tingkat Provinsi dan Kab/Kota, (adanya regulasi baru/revisi pasal 35 sd. 41);
- 2) Perlu pengaturan khusus peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana keolahragaan penunjang prestasi olahraga yang layak dan berstandar nasional dan atau internasional (pasal 67 dan 68);
- 3) Mendorong kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan anggaran minimal 2% untuk pembinaan olah raga pada usia dini diambil dari penggaran pendidikan 20%, termasuk dana CSR untuk kegiatan sosial dapat dialokasikan untuk kegiatan keolahragaan (pertajam pasal 69 sd 73).

b. Olahraga Pendidikan (pasal 18 dan 25)

Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal seperti adanya SMANKO di Sulsel belum menggunakan kurikulum khusus, kurikulum yang digunakan masih tidak jauh berbeda dengan sekolah umum lainnya. Demikian juga dengan sarana dan prasarana pendukung di SMANKO masih sangat terbatas sehingga peserta didik yang punya bakat olahraga belum dapat mendapatkan layanan pembinaan yang maksimal. Maka dalam hal ini mengusulkan sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya penajaman dalam pengelolaan olahraga pendidikan secara khusus pada setiap jenjang pendidikan sehingga dapat berjalan secara berkelanjutan dan terstruktur, contoh kelas olahraga, sekolah khusus olahraga dan sebagainya;
- 2) Adanya pendanaan khusus untuk pembinaan olahraga usia dini yang diambil dari alokasi dana pendidikan 20%.
- 3) Ketersediaan sarana dan prasarana keolahragaan di sekolah menjadi prasyarat utama dalam pengembangan pembinaan bakat di sekolah;
- 4) Perlu ada regulasi yang ditujukan adanya perlakuan khusus bagi anak yang memiliki bakat olahraga.

c. Olahraga Rekreasi (pasal 19 dan 26)

Saat ini penggalan dan pelestarian olahraga masyarakat masih terbatas. Optimalisasi organisasi olahraga rekreasi dalam mengakselerasi, menggali, mengembangkan dan memajukan olahraga rekreasi belum optimal. Selain itu olahraga berkebutuhan khusus, dalam pasal 30 tertulis “pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat, menjadi bagian dari Olahraga Rekreasi”, namun saat ini pembinaannya belum berjalan optimal. Maka dalam hal ini mengusulkan sebagai berikut:

- 1) Perlu ada pola integrasi antara olah raga pendidikan dan olahraga rekreasi, agar tidak berjalan secara parsial; contoh : Pelaksanaan ekstrakurikuler di sekolah
- 2) Perlu ditambahkan adanya kejuaraan olahraga rekreasi dan berkebutuhan khusus secara berjenjang seperti pada olahraga pendidikan dan prestasi;
- 3) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dengan pelibatan masyarakat perlu diatur dalam regulasi.

5. Bidang Kepemudaan

- a. Program kepemudaan dari Kemenpora RI tahun 2020 dan 2021 yang dilaksanakan/difasilitasi Dinas kepemudaan dan olah Raga Provinsi Sulawesi Selatan khususnya dalam hal pemberdayaan pemuda, pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, pembinaan organisasi kepemudaan, serta pembinaan pramuka adalah sebagai berikut :

- 1) Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional. Pada ajang ini, prestasi Sulawesi Selatan tahun 2020 meraih peringkat III bidang sumber daya air, lingkungan dan pariwisata. Pada tahun

- 2021 saat ini sedang berlangsung tahap seleksi di 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan;
- 2) Jambore Pemuda Indonesia dilaksanakan secara virtual dengan jumlah peserta hasil seleksi sebanyak 14 orang yang dilaksanakan secara virtual. Prestasi peserta Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 juara meraih harapan I dengan konten pementasan Tari Anrong yang berasal dari Kabupaten Bulukumba;
 - 3) Pertukaran Pemuda Antara Negara. Pada tahun 2020 Provinsi Sulawesi Selatan mengutus 1 orang tujuan negara Australia, dilaksanakan secara daring karena pandemi Covid-19.
 - 4) Program Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) dari Kemenpora RI;
 - 5) Monitoring dan evaluasi program pengembangan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) di Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Dan Kemenpora RI.
- b. Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menangani permasalahan pembinaan kepemudaan adalah sebagai berikut :
- 1) Memfasilitasi/melaksanakan program kegiatan dari Pemerintah Pusat;
 - 2) Memfasilitasi berbagai program kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sulawesi Selatan seperti, (1) pembinaan lembaga kepemudaan dengan pola kemitraan dalam bentuk dialog pemuda, (2) program pengembangan dan kepeloporan pemuda dalam bentuk seleksi, pemusatan pelatihan Paskibraka dan studi wawasan, (3) pengembangan kepemimpinan kepeloporan dan kesukarelawan pemuda, (4) program pemberdayaan pemuda dan pramuka dalam bentuk kegiatan seleksi PPAN dan (5) peningkatan dan penguatan lptek dan mental spritual pemuda;
 - 3) Memfasilitasi pembentukan pengurus Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini sementara berproses di Majelis Permusyawaratan Nasional (MPN) KIPAN;
 - 4) Melaksanakan instruksi dari Inpres no. 2 tahun 2020 dan Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) antara Dispora Provinsi Sulawesi Selatan dan BNNP Sulawesi Selatan.

6. Bidang Perpustakaan

- a. Upaya Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memajukan layanan perpustakaan dan literasi tiga tahun terakhir ini, di antaranya adalah :
- 1) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur perpustakaan baik yang bersumber dari anggaran DAK, maupun APBD;
 - 2) Peningkatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan melakukan refleksi perpustakaan desa yang ada di

- Sulawesi selatan. Pada tahun 2020 telah mereflikasi perpustakaan desa sebanyak 166 titik;
- 3) Pembangunan dan pengembangan perpustakaan ibu dan anak sebagai salah satu inovasi dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus menjadi *role model* untuk kawasan timur Indonesia.
 - b. **Koleksi Perpustakaan.** Secara umum jumlah koleksi perpustakaan-perpustakaan di Sulawesi Selatan yang disimpan dan dikelola sebanyak 10.028.442 exemplar, khususnya untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 499.993 exemplar;
 - c. **Naskah Kuno.** Jumlah naskah kuno yang ada di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan kurang lebih 3684 judul;
 - d. **Perpustakaan Umum.** Jumlah perpustakaan umum yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan termasuk perpustakaan umum desa/kelurahan sebanyak 1.366 perpustakaan;
 - e. **Perpustakaan khusus.** Jumlah Perpustakaan Khusus yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 77 Perpustakaan Khusus;
 - f. **Pustakawan.** Jumlah pustakawan yang dibina oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sebanyak 431 orang dan tersebar di kabupaten/kota;
 - g. **Pemustaka.** Jumlah kunjungan pemustaka ke perpustakaan secara aktif sebelum pandemi Covid – 19, rata-rata per harinya sebanyak 800 – 1000 orang, dengan adanya pandemi covid-19 dan pemberlakuan protokol kesehatan, jumlah kunjungan pemustaka berkurang drastis, rata-rata per hari sebanyak 200 orang;
 - h. **Sumber Daya Perpustakaan.** Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa berupaya melakukan pembenahan terhadap sumber daya perpustakaan yang ada baik peningkatan sumber daya manusianya, sarana dan prasarana serta perencanaan anggaran yang berorientasi ke masyarakat;
 - i. **Deposit.** Koleksi deposit yang tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 15.250 judul dan 16.938 eksamplar;
 - j. Upaya yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menangani persoalan layanan perpustakaan selama masa pandemi Covid-19 di antaranya sebagai berikut:
 - 1) Melakukan sosialisasi terhadap pegawai dan pemustaka tentang Covid-19, baik secara langsung maupun melalui informasi media dalam bentuk papan bicara, dan spanduk;
 - 2) Menyediakan fasilitas kesehatan seperti masker, sabun, wastafel darurat dan *hand sanitizer* baik bagi pemustaka maupun pegawai;
 - 3) Melakukan pembatasan jam kerja selama pandemi covid-19 dengan membuat jadwal pembagian kerja dan pembatasan masuk kerja berdasarkan usia dan orang yang dalam usia rentan terhadap suatu penyakit dalam bentuk kebijakan *Work From Home* (WFH);

- 4) Vaksinasi dan pemberian suntikan vitamin bagi seluruh pegawai;
- 5) Pembatasan jumlah kunjungan dan jam kunjungan bagi pemustaka;
- 6) Membentuk SATGAS COVID-19 lingkup dinas untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai maupun pemustaka yang terindikasi melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

B. PERMASALAHAN DAN TEMUAN

1. Bidang Pendidikan

- a. Pelaksanaan vaksinasi guru dan tenaga kependidikan masih perlu dukungan mengingat masih terdapat 8 Kabupaten di Sulawesi Selatan yang belum terjadwal untuk melakukan vaksinasi, yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Takalar, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Barru, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Bantaeng;
- b. Pelaksanaan pendidikan jarak jauh selama masa pandemi Covid-19 masih mengalami kendala sebagai berikut: *pertama*, masih terdapatnya *blank spot* jaringan internet di beberapa Kabupaten/Kota sehingga menghambat pelaksanaan BDR. *Kedua*, keterbatasan kepemilikan gawai baik guru maupun peserta didik. *Ketiga*, sumber daya guru yang belum mampu dan terbiasa memanfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan kewajiban mengajar dan *keempat*, biaya berlangganan kuota internet yang masih tinggi bagi kalangan ekonomi tidak mampu.

2. Bidang Kebudayaan

- a. Persoalan pembinaan kebudayaan di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu kurangnya inovasi dan kreatifitas lembaga masyarakat dalam mengedukasi kurangnya pemahaman masyarakat atas nilai-nilai budaya dan kearifan budaya lokal, serta kurang maksimalnya pemanfaatan kekayaan budaya sebagai nilai jual tujuan wisata di Sulawesi Selatan;
- b. Masih rendahnya perhatian Pemerintah Daerah dalam hal pelestarian (pembinaan, pengembangan, perlindungan, dan pemanfaatan) kebudayaan, baik dari kebijakan regulasi maupun penganggaran dalam rangka pemajuan kebudayaan;
- c. Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian sebagian masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya tindak pelanggaran terhadap upaya perlindungan Cagar Budaya di beberapa daerah, misalnya pencurian, pemalsuan, pembawaan Cagar Budaya ke luar negeri secara *illegal*, corat-coret pada batu-batu atau situs yang diduga sebagai cagar budaya.

3. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. Vaksinasi terhadap para pelaku pariwisata di provinsi Sulawesi selatan sudah ada namun belum maksimal dan merata. Maka dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap dukungan dari berbagai pihak untuk mempercepat proses vaksinasi bagi pelaku usaha pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan;

- b. Akibat dari dampak pandemi COVID-19, terjadi penurunan drastis jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Sulawesi Selatan kurang lebih 60% sampai 85%;
- c. Jumlah okupansi hunian hotel dan kunjungan rumah makan/restoran di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan yang signifikan sehingga mempengaruhi ekonomi masyarakat dan pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari sektor penerimaan pajak.

4. Bidang Olahraga dan Kepemudaan

- a. Dukungan terhadap layanan pengembangan olahraga prestasi di Sulawesi Selatan masih sangat terbatas terutama pada aspek biaya dan sarana prasarana pendukung peningkatan prestasi olahraga. Keterbatasan kemampuan daerah mengakibatkan adanya penyesuaian program berupa pengurangan terhadap anggaran yang tersedia;
- b. Permasalahan pembinaan kepemudaan yang sering muncul di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Kurangnya program kegiatan Kepemudaan akibat terbatasnya anggaran baik yang bersumber dari APBD dan dukungan dari APBN;
 - 2) Kurangnya fasilitas/sarana kepemudaan;
 - 3) Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda.
 - 4) Tingginya tingkat pengangguran pemuda;
 - 5) Rendahnya kreatifitas dan jiwa wirausaha di kalangan pemuda.
 - 6) Kurang maksimalnya Pemerintah memberikan penghargaan terhadap pemuda berprestasi.

5. Bidang Perpustakaan

- a. Dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang belum memadai untuk proses kegiatan penyelenggaraan perpustakaan secara maksimal;
- b. Secara umum, dari awal masa pandemi Covid-19 sampai sekarang permasalahan yang muncul terhadap layanan perpustakaan di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain :
 - 1) Layanan perpustakaan keliling sama sekali tidak dapat beroperasi. Hal ini disebabkan karena seluruh titik layanan adalah sekolah dan daerah-daerah keramaian ditutup untuk mencegah penyebaran Covid-19;
 - 2) Sosialisasi dan edukasi terkait Covid-19 belum berjalan secara baik di awal pandemi, sehingga masih sering dijumpai pemustaka yang melanggar protokol kesehatan seperti kesalahan dalam penggunaan masker, cara cuci tangan dan tidak menjaga jarak;
 - 3) Perilaku jujur dan terbuka yang tidak dapat terdeteksi baik dari pemustaka itu sendiri maupun dari pengelola perpustakaan (petugas).

C. MASUKAN DAN ASPIRASI PEMANGKU KEPENTINGAN DAERAH

1. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam pertemuan dengan Pemprov Sulawesi Selatan, serta para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan menyampaikan masukan dan pandangan terkait kebijakan, program serta kegiatan, yaitu:

- a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan dalam kesempatannya menyampaikan informasi dan aspirasi sebagai berikut;
 - 1) Selama masa pandemi Covid-19, kebijakan fleksibilitas dana BOS untuk digunakan meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan serta keberadaan kurikulum adaptif sangat membantu berjalannya proses belajar mengajar selama masa pandemi Covid-19;
 - 2) Selama masa pandemi Covid-19, 93% satuan pendidikan (SMU dan SMK) se-Sulawesi Selatan melaksanakan pembelajaran jarak jauh, sedangkan sisanya 7% melaksanakan tatap muka;
 - 3) Sebanyak 1028 satuan pendidikan (SMU dan SMK) telah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan telah menunjuk tiga SMU untuk melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas, yaitu SMU 2, SMU 4 dan SMU 21 dengan ketentuan batasan siswa dalam kelas terisi hanya 50% dan 50% sisanya melaksanakan pembelajaran jarak jauh;
 - 4) Kebijakan moratorium pengangkatan PNS untuk tenaga guru telah membuat ketersediaan guru di Sulawesi Selatan berkurang karena banyaknya guru yang telah memasuki usia pensiun. Maka dengan adanya program seleksi 1 juta ASN Guru Skema PPPK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan telah mengusulkan jumlah formasi sebanyak 11.228 formasi guru untuk mengisi kekurangan guru di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 5) Meminta dukungan Pemerintah Pusat dan Komisi X DPR RI menambah satu Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) terstandar sebagai sekolah luar biasa model di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 6) Meminta dukungan dan penguatan peran SMK Negeri di Sulawesi Selatan. Saat ini sebanyak 168 yang telah di SK – kan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan telah diusulkan untuk mengikuti program SMK Pusat Unggulan Kemendikbud RI.
- b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan meminta agar Pemerintah Pusat perlu terus mendorong dan memberi dukungan kebijakan yang menggairahkan Pemerintah Daerah dalam memajukan kebudayaan sesuai amanah UU dan Jati Diri Bangsa;
- c. Pemuda Katolik Sulawesi Selatan dalam kesempatannya menyampaikan beberapa informasi dan aspirasi sebagai berikut:
 - 1) Meminta agar meningkatkan kualitas jaringan dan *coverage* area layanan internet di Kabupaten Tana Toraja agar pelaksanaan proses belajar mengajar pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan;

- 2) Meminta agar Pemerintah Pusat agar memberikan kesempatan kepada guru-guru honorer yang telah mengabdikan berpuluh-puluh tahun diprioritaskan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - 3) Meminta dukungan Komisi X DPR RI agar dalam pelaksanaan kebijakan otonomi kampus, perguruan tinggi negeri dan swasta tidak lagi menerapkan sanksi akademik kepada mahasiswa.
- d. Kepala Sekolah SMUN 21 Makassar dalam kesempatan kunjungan Lapangan Komisi X DPR RI ke SMUN 21 Makassar menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut:
- 1) SMUN 21 Makassar telah *me-launching* uji coba pelaksanaan pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada tanggal 9 April 2021. Pelaksanaan uji coba PTM terbatas mengacu pada:
 - a) Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/Kb/2020, 737 Tahun 2020, Hk.01.08/Menkes/7093/2020 Dan 420-3987 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - b) Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 97/Sipres/A6/III/2021 (Kemendikbud Mendorong Akselerasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Melalui Pengumuman Keputusan Bersama Empat Menteri.
 - 2) Secara teknis, SMUN 21 telah menyiapkan aturan protokol kesehatan selama pelaksanaan PTM terbatas, di antaranya pembatasan jumlah peserta didik dalam kelas, sistem pembelajaran integrasi PTM dan belajar dari rumah (BDR), prosedur pengantaran dan penjemputan peserta didik, dan kesiapan infrastruktur penunjang kesehatan pencegahan Covid-19 dalam lingkungan sekolah;
 - 3) Meminta agar percepatan vaksinasi bagi guru dan tenaga kependidikan segera dilakukan, mengingat baru 60% guru dan tenaga kependidikan di SMUN 21 Makassar yang telah menjalani vaksinasi tahap pertama.

2. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam pertemuan dengan Pemprov Sulawesi Selatan, serta para pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif menyampaikan masukan dan pandangan terkait kebijakan, program serta kegiatan, yaitu

- a. Plt Gubernur Sulawesi Selatan dalam kesempatannya menyampaikan beberapa informasi dan aspirasi sebagai berikut:
 - 1) Progres pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal perdagangan dan transportasi dalam lima tahun terakhir sangat maju dan salah satu keunggulan Provinsi Sulawesi Selatan karena karena Kota Makassar telah menjadi kota hub untuk wilayah Indonesia Timur;
 - 2) Pemprov Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mengembalikan pariwisata di Tana Toraja menjadi destinasi pariwisata populer kedua di Indonesia bagi wisatawan mancanegara setelah Bali;

- 3) Dukungan dari Pemerintah Pusat yang telah menggelontorkan Rp 800 miliar untuk pembangunan Bandara Buntu Kunik Toraja diharapkan mampu mendongkrak kunjungan pariwisata ke Tana Toraja;
 - 4) Bandara Internasional Hasanuddin menjadi bandara hub transit, maka dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meminta dukungan pembangunan *shuttle bus* dari dan ke Bandara Internasional Hasanuddin untuk menjangkau destinasi-destinasi wisata terdekat.
- b. Ketua PHRI Sulawesi Selatan dalam kesempatannya menyampaikan beberapa usulan aspirasi sebagai berikut:
- 1) Meminta agar kegiatan-kegiatan kedinasan difokuskan dilaksanakan di hotel-hotel untuk membantu proses pemulihan usaha perhotelan akibat dampak penurunan penghasilan selama masa pandemi COVID-19;
 - 2) Berharap ada kebijakan khusus untuk mengembalikan kembali kepopuleran pariwisata Tana Toraja yang memiliki keunggulan pada aspek pariwisata budaya dan alamnya;
 - 3) Pelaku usaha pariwisata di Makassar tidak mendapatkan hibah pariwisata secara merata;
 - 4) Meminta agar ada kemudahan syarat bagi pelaku usaha pariwisata untuk mendapatkan akses pinjaman pembiayaan di bank dengan bunga ringan dan waktu jatuh tempo pembayaran lebih lama untuk mendukung upaya pemulihan pariwisata karena pandemi Covid-19.
- c. Ketua GIPI Sulawesi Selatan dalam kesempatannya menyampaikan beberapa usulan dan aspirasi sebagai berikut:
- 1) Saat ini terdapat 264 desa wisata yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan yang membutuhkan dukungan baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan;
 - 2) Meminta agar regulasi pengembangan dan pembinaan destinasi-destinasi desa wisata diatur;
 - 3) Meminta agar ada pelibatan keterlibatan kelompok atau organisasi wisata lebih luas dalam pendampingan desa wisata;
 - 4) meminta agar ada program sertifikasi atau pelatihan khusus untuk pengembangan kapasitas kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sebagai pendamping desa wisata di Sulawesi Selatan.

3. Bidang Olahraga dan Kepemudaan

Dalam pertemuan dengan Pemprov Sulawesi Selatan, serta para pemangku kepentingan kepemudaan menyampaikan masukan dan pandangan terkait kebijakan, program serta kegiatan, yaitu:

- a. Dispora Provinsi Sulawesi Selatan dalam kesempatannya menyampaikan aspirasi sebagai berikut :
- 1) Setuju dengan adanya penyusunan Desain Besar Keolahragaan Nasional, namun mengharapkan inisiasi penyusunan Desain Besar Keolahragaan Nasional dapat berjalan sinergi dengan program pemerintah daerah. Selain itu keberadaan Desain Besar Keolahragaan Nasional nantinya perlu menegaskan

- regulasi mengenai tahapan pembinaan olahraga prestasi mulai dari usia dini hingga senior di tingkat daerah hingga nasional secara berjenjang dan berkelanjutan;
- 2) Berharap dukungan pengadaan sarana prasarana latihan dari Kemenpora RI terutama bagi cabang-cabang olahraga yang masuk dalam program Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) atau SMA Khusus Keberbakatan Olahraga (SMANKO).
- b. Kwarda Pramuka Sulawesi Selatan dalam kesempatannya menyampaikan informasi dan aspirasi sebagai berikut:
- 1) Mengapresiasi atas dukungan fasilitas dari Pemprov Sulawesi Selatan sehingga Pramuka Sulawesi Selatan mampu turut berkontribusi membantu masyarakat dalam pemulihan berbagai bencana alam yang terjadi di Sulawesi Selatan;
 - 2) Memohon dukungan Pemerintah Pusat dan Komisi X DPR RI untuk merealisasikan adanya Bumi Perkemahan Pramuka untuk pembinaan kepemudaan di Sulawesi Selatan.

4. Bidang Perpustakaan

Dalam pertemuan dengan Pemprov Sulawesi Selatan, serta para pemangku kepentingan menyampaikan masukan dan pandangan terkait kebijakan, program serta kegiatan, yaitu dari Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam kesempatannya menyampaikan aspirasi sebagai berikut (1) meminta agar Pemerintah Pusat mendukung upaya Pemprov Sulawesi Selatan meningkatkan kualitas literasi masyarakat di Sulawesi Selatan mengingat minimnya anggaran yang tersedia jika hanya mengandalkan APBD Sulawesi Selatan, dan (2) Meminta dukungan program penguatan literasi desa yang sedang dilakukan oleh perpustakaan-perpustakaan desa yang di Sulawesi Selatan.

D. TANGGAPAN DAN PANDANGAN KOMISI X DPR RI

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Dinas Olahraga dan Pemuda, juga dihadiri oleh para pemangku kepentingan pendidikan, perguruan tinggi, pariwisata, ekonomi kreatif, olahraga dan pemuda dilanjutkan dengan kunjungan lapangan SMU 21 Makassar untuk melihat persiapan pelaksanaan pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka (PTM) dan Benteng Rotterdam Makassar. Dari pertemuan dan kunjungan lapangan, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI antara lain:

1. Dalam bidang pendidikan, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI menekankan agar persiapan pelaksanaan pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka terbatas yang sedang dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan bersama satuan pendidikan dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan dan SKB 4 Menteri. Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI juga mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer melalui peningkatan insentif transportasi per-jam mengajar meskipun jumlahnya masih di bawah UMR regional;

2. Dalam bidang kebudayaan, Tim Komisi X DPR RI mengapresiasi upaya dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus melestarikan tradisi dan ekosistem cagar budaya yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dan mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat Sulawesi Selatan untuk turut serta menjaga aset budaya guna pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI menekankan agar rencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mempopulerkan kembali destinasi pariwisata di Sulawesi Selatan yang berorientasi wisata alam dan budaya, khususnya di Tanah Toraja. Terkait upaya mengembangkan kembali Tana Toraja sebagai destinasi populer setelah Bali, perlu dikoordinasikan secara intensif dengan Pemerintah Pusat khususnya dengan dengan Kemenparekraf RI dan Kemendikbud RI. Untuk itu Tim Kunjungan kerja Komisi X DPR RI mendukung Tana Toraja untuk menjadi destinasi prioritas nasional;
4. Dalam bidang pemuda dan olahraga, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI mengharapkan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera menyiapkan langkah-langkah strategis terhadap permasalahan pemuda dan olahraga, baik permasalahan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi maupun permasalahan kepemudaan dan keolahragaan secara umum yang ada di Sulawesi Selatan terutama penyesuaian konsep pengembangan kawasan dan penyediaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, mengingat saat ini Kota Makassar telah menjadi “Kota Hub” pertemuan antar wilayah dan sebagai pintu gerbang pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
5. Dalam bidang perpustakaan, Tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI mengharapkan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperhatikan dan mendukung keberadaan perpustakaan desa atau perpustakaan yang dikelola masyarakat secara pribadi yang tersebar di seluruh daerah untuk meningkatkan literasi dan akses masyarakat memperoleh bahan bacaan yang berkualitas.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas, dari berbagai pertemuan dan kunjungan lapangan yang telah dilakukan, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bidang pendidikan, Secara umum, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan PTM terbatas dengan mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/Kb/2020, 737 Tahun 2020, Hk.01.08/Menkes/7093/2020 Dan 420-3987 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Namun, pelaksanaan PTM terbatas masih menemui kendala karena pelaksanaan vaksinasi guru dan tenaga kependidikan

masih belum merata dan perlu dukungan mengingat masih terdapat 8 Kabupaten di Sulawesi Selatan yang belum terjadwal untuk melakukan vaksinasi, yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Takalar, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Barru, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Bantaeng. Terkait dengan pelaksanaan pendidikan jarak jauh selama masa pandemi Covid-19 masih mengalami kendala sebagai berikut: *pertama*, masih terdapatnya *blank spot* jaringan internet di beberapa Kabupaten/Kota sehingga menghambat pelaksanaan BDR. *Kedua*, keterbatasan kepemilikan gawai baik guru maupun peserta didik. *Ketiga*, sumber daya guru yang belum mampu dan terbiasa memanfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan kewajiban mengajar dan *keempat*, biaya berlangganan kuota internet yang masih tinggi bagi kalangan ekonomi tidak mampu.

- b. Bidang kebudayaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai upaya dalam menjaga dan mendukung keberadaan kebudayaan di Sulawesi Selatan di antaranya (1) mendorong percepatan penetapan pemukiman tradisional Tana Toraja sebagai warisan dunia, (2) mendorong beberapa tradisi di Sulawesi Selatan menjadi warisan budaya tak benda, (3) mendorong revitalisasi Benteng Somba Opu, (4) melakukan penetapan cagar budaya peringkat provinsi, (5) melakukan pemeliharaan cagar budaya di Sulawesi Selatan, (6) melakukan pelestarian permainan tradisional, (7) mendorong pembentukan dan pengembangan lembaga adat di Sulawesi Selatan, (8) pengusulan Geopark Maros – Pangkep menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark (UGGP), dan pembentukan Geopark Matao dan Toraja. Namun upaya di atas masih menemui beberapa kendala seperti masih rendahnya kesadaran dan kepedulian sebagian masyarakat terhadap nilai penting Cagar Budaya. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya tindak pelanggaran terhadap upaya perlindungan Cagar Budaya di beberapa daerah, misalnya pencurian, pemalsuan, pembawaan Cagar Budaya ke luar negeri secara *illegal*, corat-coret pada batu-batu atau situs yang diduga sebagai cagar budaya.
- c. Dalam bidang pariwisata, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki destinasi wisata yang potensial, kaya dan beragam, baik wisata alam, budaya, sejarah, dan religi. Di antara destinasi wisata potensial dan unggulan yaitu Tana Toraja. Namun pengelolaan bidang pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan masih menemukan kendala dan permasalahan utama yaitu belum terintegrasinya sistem transportasi lintas destinasi pariwisata yang di provinsi Sulawesi Selatan. Dengan ditetapkannya Bandara Hasanuddin menjadi “bandara hub”, Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen akan terus meningkatkan akses layanan transportasi dari bandara ke lokasi-lokasi wisata terdekat dari bandara, termasuk untuk akses ke destinasi wisata Tana Toraja. Adapun permasalahan menonjol dalam upaya pemulihan pariwisata Sulawesi Selatan setelah terdampak Covid-19 ialah vaksinasi terhadap para pelaku pariwisata di Provinsi Sulawesi selatan belum maksimal dan merata.
- d. Dalam bidang pemuda dan olahraga, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di masa pandemi Covid-19 masih melakukan pembinaan bidang

kepemudaan dan keolahragaan dengan pelaksanaan sesuai dengan protokol kesehatan. Pemerintah Provinsi Selatan telah mempersiapkan keikutsertaannya dalam beberapa even olahraga yang akan dilaksanakan di antaranya PON XX di Papua, Papernas 2021 dan pengiriman atlet mewakili Indonesia pada Sea Games di Vietnam. Adapun dari sisi kepemudaan, Kwarda Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan saat ini dalam proses persiapan membangun lokasi perkemahan melalui dukungan APBD dan masih membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat.

- e. Bidang perpustakaan, Provinsi Sulawesi Selatan dalam tiga tahun terakhir telah berupaya meningkatkan layanan dan infrastruktur seperti (1) maksimalisasi DAK dan anggaran APBD untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur perpustakaan daerah, (2) peningkatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan melakukan refleksi perpustakaan desa yang ada di Sulawesi selatan dan (3) pembangunan dan pengembangan perpustakaan ibu dan anak sebagai salah satu inovasi dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus menjadi *role model* untuk kawasan timur Indonesia. Selama pandemi Covid-19, layanan perpustakaan di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami hambatan seperti penghentian layanan perpustakaan keliling dan sosialisasi dan edukasi terkait Covid-19 belum berjalan secara baik di awal pandemi, sehingga masih sering dijumpai pemustaka yang melanggar protokol kesehatan seperti kesalahan dalam penggunaan masker, cara cuci tangan dan tidak menjaga jarak.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi yang telah disampaikan di atas, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

A. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk melakukan koordinasi dengan K/L terkait, khususnya dengan Kemendagri RI, Kemenkes RI dan Kemenag RI untuk memastikan pelaksanaan kebijakan PTM terbatas pada bulan Juli 2021 nanti berjalan dengan baik dan secara sungguh-sungguh melakukan antisipasi terhadap pendidik dan peserta didik agar tidak terpapar Covid-19. Selain itu memastikan agar seluruh guru dan tenaga kependidikan di Indonesia telah divaksin, khususnya para guru di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, yang sampai saat ini belum terjadwalkan divaksin.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, penerapan kurikulum adaptasi di masa pandemi, pembelajaran jarak jauh dan bantuan kuota belajar agar layanan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat berjalan efektif dan efisien.

3. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pemajuan kebudayaan berupa pendampingan pengusulan Pemukiman Tradisional Tana Toraja dan Geopark Maros – Pangkep dan beberapa situs cagar budaya lain ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Selain itu mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan sektor swasta, seperti industri pariwisata, lembaga atau organisasi swadaya masyarakat terlibat dalam pemajuan kebudayaan di Sulawesi Selatan.

B. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Mendorong Kemenparekraf RI melakukan koordinasi dengan K/L lain dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata di Tana Toraja sebagai destinasi alam dan budaya unggulan dan menjadi destinasi wisata prioritas;
2. Mendesak Kemenparekraf RI melakukan koordinasi dengan Kemenkes RI untuk percepatan vaksinasi bagi pelaku pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Mendorong Kemenparekraf RI untuk mengembangkan potensi dan ekosistem desa-desa wisata dalam upaya memperkenalkan budaya tradisi bangsa dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa;
4. Mendesak Kemenparekraf RI untuk mempertegas posisi Ekraf dengan pariwisata dan sektor lainnya, mengingat Ekraf tidak hanya terkait dengan pariwisata, tapi juga terkait dengan permodalan, pemasaran produk ekonomi kreatif.

C. Bidang Olahraga dan Kepemudaan

1. Mendesak Kemenpora RI untuk memastikan jadwal pelaksanaan agenda-agenda olahraga nasional agar pemerintah daerah dapat mempersiapkan diri secara maksimal;
2. Meminta Kemenpora RI dalam menyusun Desain Besar Pembinaan Olahraga Nasional mendengar masukan dari pemangku daerah agar konsep pembinaan olahraga yang ada di dalam Desain Besar Pembinaan Olahraga Nasional bisa dilaksanakan guna meningkatkan prestasi olahraga daerah dan nasional dan memasyarakatkan olahraga;
3. Mendorong kepada Kemendikbud RI dan Kemenpora RI untuk mendukung peran Gerakan Pramuka dalam pembinaan karakter dan kepemimpinan generasi muda.

D. Bidang Perpustakaan

1. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional RI meningkatkan sinergitas dengan Kemensos RI dan Kemendes PPDT RI dalam pemenuhan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan perpustakaan di desa. Sehingga semua lapisan masyarakat mampu mendapatkan akses buku beragam dan berkualitas serta dapat terlayani dengan baik;
2. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional RI untuk melakukan pembinaan kepada pengelola perpustakaan daerah agar bisa melakukan terobosan strategis pelayanan masyarakat di masa Pandemi COVID 19 dengan memanfaatkan TIK (layanan berbasis digital).

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi X DPR-RI pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Sulawesi Selatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 23 April 2021

KETUA TIM,

Ttd.

MY ESTI WIJAYATI

A-203